



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMZAH KHOLIFI
2. Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 713702

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI 100 CC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 98.116.581

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 573.116.581

III. HUTANG Rp. 104.586.170

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 468.530.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.